

BAB I

PENDAHULUAN

Beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang, masih ada masalah besar terkait pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Banyak sampah plastik tidak didaur ulang dengan benar, dan sistem pembuangan sampah sering kali tidak teratur, sehingga sebagian besar sampah tersebut mencemari laut. Indonesia juga menghadapi masalah serupa dengan tingginya konsumsi plastik. Bahkan, Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹ Tuti Hendrawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, menyatakan bahwa pada tahun 2019, jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 9,52 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa toko, konsumen, dan anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) masih menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar, sekitar 10,95 juta ton setiap tahunnya.²

Masalah kebersihan lingkungan di Indonesia, khususnya terkait penggunaan kantong plastik, menghadapi tantangan serius. Penggunaan kantong plastik saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, baik di pasar tradisional maupun modern. Plastik menjadi komponen umum pada kemasan makanan, pembungkus alat elektronik, dan berbagai peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan sendok.

¹ CNN Indonesia. 2016. Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia., melalui web CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia>

² Wahyuni, T. 2016. *Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia*.

Penggunaan plastik yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan berbagai penyakit. Plastik juga sulit diurai oleh mikroorganisme, dan proses peruraian di dalam tanah memerlukan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Pembakaran sampah plastik tidak disarankan karena dapat menghasilkan gas berbahaya yang mencemari udara dan berpotensi merugikan kesehatan pernapasan manusia. Selain itu, penimbunan sampah plastik di tanah dapat mencemari lingkungan tanah dan air tanah.³

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya mengatasi sejumlah permasalahan tersebut dengan menerbitkan regulasi lokal, yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 yang mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik. Pemerintah, sebagai pemegang peran kunci, harus memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif dari Peraturan Daerah (PERDA) tersebut. Bimbingan tersebut mencakup sosialisasi melalui berbagai media seperti cetak, elektronik, sosial, spanduk, dan informasi di tempat-tempat umum, serta melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi pemuda. Selain itu, pengawasan diperlukan terhadap produsen, pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan konsumen.⁴

³ Karuniastuti, Nurhenu. (2017). Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Jurnal Forum Teknologi. Volume. 03. Nomor. 01.

⁴ Muhaimin, Noor Khalida. *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi*. Jambi:2021. Vol 5 no. 2

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2014 yang dirilis setiap lima tahun, informasi mengenai Persentase Cara Pengelolaan Sampah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat disajikan, pengelolaan sampah di Provinsi Jambi masih didominasi oleh pembakaran, mencapai 60,5 persen. Pengangkutan sampah oleh petugas mencapai 18,4 persen. sementara 11,2 persen sampah dibuang ke parit, kali, atau laut. Sebanyak 6 persen, sampah ditimbun dalam tanah, dan 3,7 persen dibuang sembarangan. Pengelolaan sampah menjadi kompos hanya sebesar 0,3 persen.⁵

Perincian pengelolaan sampah per kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagai contoh, pembuangan sampah ke sungai paling dominan terjadi di Kabupaten Kerinci dengan persentase mencapai 38,3 persen, diikuti oleh Kota Sungai Penuh dengan 25 persen, dan Tanjung Jabung Timur dengan 22,2 persen. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menonjol dalam pembuangan sampah secara sembarangan, mencapai 17,6 persen, sementara Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh mengalami pengangkutan sampah oleh petugas yang mencapai lebih dari 50 persen.

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah Kota Jambi Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	Timbulan Sampah	
			M ³ /Hari	Ton/Hari
1	Kecamatan Pasar	13750	35,8	7,9
2	Kec. Jelutung	72347	188,1	41,4
3	Kec. Pall Merah	87784	228,2	50,2
4	Kec. Danau Sipin	47916	124,6	27,4

⁵ Universitas Jambi. (2019)

5	Kec. Alam Barajo	87114	226,5	49,8
6	Kec. Pelayangan	13835	36,0	7,9
7	Kec. Jambi Timur	69965	181,9	40,0
8	Kec. Jambi Selatan	62719	163,1	35,9
9	Kec. Kota Baru	74739	194,3	42,8
10	Kec. Telanai Pura	48379	125,8	27,7
11	Kec. Danau Teluk	13442	35,0	7,7
Jumlah		591991	1539,2	338,6

Sumber : Arsip Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (2017)

Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi pengelolaan sampah di Provinsi Jambi, menyoroti pola yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota dan menunjukkan tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.⁶

Namun, hingga kini, kantong plastik masih banyak digunakan di pasar tradisional, rumah makan, pedagang plastik, warung, dan penjual kaki lima. Sampah rumah tangga juga masih lebih banyak menggunakan kemasan plastik daripada kardus. Ini menunjukkan bahwa Upaya pemerintah untuk mengurangi pembatasan penggunaan plastik belum optimal. Oleh karena itu, sosialisasi perlu melibatkan semua pihak dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 1.2 Pengelolaan Sampah Kota Jambi 2021

No	Variabel	Nilai	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	60.923	2021
2	Timbulan sampah per hari	1.522,31 m ³	423, 45 Ton %
3	Sampah diolah TPS 3R	27,6 Ton	6,52 %

⁶ Laporan DLH Kota Jambi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi 2017

4	Sampah dimanfaatkan Bank Sampah	0,28 Ton/hari	0,07 %
5	Sampah dimanfaatkan pengepul	6,33 Ton/hari	1,49%
6	Sampah diolah di WTE	0,4 Ton/hari	0.09 %
7	Sampah yang dibawa ke TPA	330,58 Ton/hari	78 %

(Sumber: Dinas LH Kota Jambi, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2, Kota Jambi menghasilkan 423,45 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 78% (330,58 ton) yang terangkut ke TPA Talang Gulo. Sisanya, sebanyak 22% kemungkinan dibakar atau dibuang di kebun, tanah kosong milik masyarakat, dimanfaatkan oleh bank sampah, pengepul sampah.⁷

Dalam era perkembangan informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, opini publik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang semakin menjadi fokus perhatian adalah kebijakan tentang penggunaan kantong plastik. Pemerintah Kota Jambi, sebagai bagian dari entitas pemerintah di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan terkait pembatasan penggunaan kantong plastik sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi plastik yang berlebihan.⁸

Penelitian ini penting karena menggali bagaimana media online itu dapat memengaruhi pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah Kota Jambi tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Dalam era digital yang dipenuhi

⁷ Terra Hakim A. 2022. *Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi*

⁸ Guier, L. 2014. Public Opinion Polling, Priming, Framing, Agenda Setting.

dengan informasi yang mudah diakses, media online memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga membantu untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam komunikasi kebijakan lingkungan melalui media online, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesadaran lingkungan dan perilaku pembatasan penggunaan kantong plastik di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kota Jambi, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika komunikasi kebijakan di era digital.

Opini publik merupakan hal kompleks yang berhubungan dengan pola pikir seseorang yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi penerimaan dan implementasi kebijakan tersebut. Bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan merespons kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik akan mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima atau menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Framing atau penyajian suatu isu oleh media online dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi juga turut berperan dalam membentuk pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.⁹

Dalam konteks ini, peneliti membandingkan penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dan dasar perbandingan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian

⁹ Geer, J. G. 2004. *Public Opinion And Polling Around The World*. California: ABC-CLIO.

yang sedang dilakukan, serta untuk mengukur tingkat orisinalitas penelitian ini. Data dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini diperoleh dari jurnal ilmiah dan skripsi. Oleh karena itu, beberapa narasi dari penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Muhaimin, Noor Khalida (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Komunikasi Kebijakan Publik dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi” perlu adanya proses sosialisasi yang menyeluruh membahas mengenai Limbah kantong plastik agar penerapan kebijakannya lebih maksimal, melalui Sosialisasi bersama stakeholder atau para pihak terkait, dan melalui himbau dan kampanye. Media yang digunakan adalah bauran media online, dan menggunakan metode media sosialisasi mengikuti forum seperti seminar, dialog, *Focus Group Discussion (FGD)*. Pengaruh kebijakan akan mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 30 % sehingga dapat mewujudkan kota Jambi yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari hasil analisis mereka indikator yang mempengaruhi adalah komunikasi kebijakan, masyarakat, dan pelaku usaha.¹⁰

Menurut Ghifary Prinardi, Dian Purwanti, Yana Fajar FY Basori (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Sukabumi”. Menurutnya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Sukabumi mencerminkan tepat kebijakan dengan Tingkat keberhasilan hingga 93%. Walaupun kebijakan ini belum mencakup sanksi tertulis

¹⁰ Muhaimin, Noor Khalida. *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi*. Jambi:2021. Vol 5 no. 2

namun langkah-langkah awal yang diambil telah memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam tulisannya menegaskan bahwa kebijakan yang tepat adalah yang sesuai dengan karakter masalah dan misi lembaga terkait. Implementasi kebijakan ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pengurangan sampah plastik yang dimana kebijakan ini masih perlu diperkuat terutama dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan. Sasaran kebijakan baru berlaku pada ritel modern, sehingga belum secara optimal mencegah pencemaran lingkungan. Diperlukan sanksi yang jelas dalam kebijakan untuk memberikan pengaruh yang lebih kuat kepada masyarakat dalam mengubah perilaku mereka terkait pembuangan sampah plastik. Dengan demikian, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan tidak hanya untuk mengurangi jumlah sampah plastik, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan kontribusi penting terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan Perwal No. 19 Tahun 2019.¹¹

Menurut Harfin Nurulhaq, Kismaartini, dan Amirudin (2020) dalam jurnal mereka yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor," Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan

¹¹ Ghifary Prinardi, Dian Purwanti, Yana Fajar FY Basori. *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Sukabumi*. Sukabumi:2023. Vol 14 No.2

Kantong Plastik telah diterapkan dengan efektif meskipun masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya jumlah staf di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta resistensi dari sebagian masyarakat terhadap penggunaan tas ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik. Ada empat faktor penting dalam proses implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam kajiannya implementasi kebijakan ini telah berjalan secara efektif meskipun masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Pemerintah Kota Bogor melibatkan berbagai pihak, termasuk pegiat lingkungan dan pelajar, untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Sikap tegas dan konsistensi dari pelaksana kebijakan diperlukan untuk menegakkan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.¹²

Menurut Cecep Wahyudin, Oetje Subagdja (2023), Abubakar Iskandar dalam jurnalnya yang berjudul “Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik” Permasalahan lingkungan hidup sudah teridentifikasi sejak lama dan menjadikan sampah adalah permasalahan nasional. Langkah kongkrit yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah di lingkungan salah satu cara nya dengan merubah penggunaan kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Perlunya keterlibatan antara dinas lingkungan hidup dengan Masyarakat atas kesepakatan untuk mengurangi

¹² Harfin Nurulhaq, Kismartini, Amirudin. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor*. Palembang, 2020. Vol 7 Nomor 1 Desember 2020

sampah di daerah kabupaten Bogor. Dan peneliti menyarankan untuk lebih menggunakan Styrofoam untuk mengurangi sampah plastik, pemerintah harus lebih fokus dan menghimbau kepada pengusaha-pengusaha kecil maupun besar untuk menggunakan Styrofoam pada tempat usaha mereka.¹³

Menurut Marsatana, dan Aminah (2020), di dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi”. Lingkungan hidup merupakan komponen yang mutlak dari kehidupan makhluk hidup. Cara penanganan sampah yang dapat dilakukan oleh Masyarakat adalah dengan menggunakan metode 5R yaitu, Refuse; menolak aktivitas yang menimbulkan sampah, Reduce; mengurangi pemakaian sampah, Reuse; menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, Recycle; mendaur ulang, Rot; melakukan pembusukan untuk sampah organik. Dengan demikian jika program itu dijalankan akan menghasilkan pengurangan sampah sedikit demi sedikit, tetapi hal yang diperlukan saat ini bagaimana Masyarakat bisa menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastic di era globalisasi ini diperlukan kebijakan – kebijakan yang tepat dan komprehensif. Agar masyarakat sekitar lebih sadar akan dampak pemakaian plastic untuk lingkungan kehidupan mereka sendiri.¹⁴

¹³ Cecep Wahyudin, Oetje Subagdja, Abubakar Iskandar. *Desain Model Collaborative Governance dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik*. (Jawa Barat). Vol 9 No. 2, Oktober 2023.

¹⁴ Marsatana Tartila Tristy, Aminah. *Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi Effectiveness of Plastik Waste Reduction Policy for Sustainability of Life in Globalization Era*

Menurut Kurnia, Yenni, dan Oji (2022) dalam jurnal mereka yang berjudul "Strategi Komunikasi Publik Pemkot Bandung dalam Pengurangan Kantong Plastik," permasalahan sampah di Bandung merupakan masalah yang belum teratasi sampai saat ini, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula sampah yang ditampung oleh pemerintahan kota Bandung. Dari aktivitas manusia komposisi sampah organik sekitar 60% - 70%, sementara sampah non-organik berkisar antara 30% - 40%. Bandung diperkirakan menghasilkan sekitar 1600 ton sampah dan mempunyai 160 ton sampah plastik yang mana berarti 10% dari sampah di Bandung itu adalah sampah plastik. Upaya yang dilakukan Pemkot Bandung dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dengan cara memulai menempelkan stiker di setiap ritel yang ada di Kota Bandung untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau sedia membayar kantong tersebut sebesar Rp.200.000. Bahwa seharusnya pihak pemerintah membuat aturan yang lebih tegas untuk larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai secara langsung.¹⁵

Menurut Faisal, Hendra, Uah. (2022) didalam jurnalnya yang berjudul "Framing Berita Pengelolaan Sampah Di Indonesia Pada Media Daring Detik.Com Dan Antarnews.Com". Indonesia merupakan negara yang masuk ke jajaran negara paling banyak menghasilkan sampah, tetapi dalam hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia yang menempati posisi penduduk terbanyak ke empat di dunia.

¹⁵ Kurnia Lucky, Yenni Yuniati, Oji Kurniadi. *Strategi Komunikasi Publik Pemkot Bandung dalam Pengurangan Kantong Plastik*. Kota Bandung : 2022

Pengelolaan sampah selama ini juga belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia disusun dalam bentuk piramida terbalik.¹⁶

Menurut Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini (2020) didalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID), menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan upaya kampanye pada media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, serta membangkitkan kesadaran dan pendapat masyarakat pada isu-isu besar yang sedang diperjuangkan. Masyarakat menjadi sasaran penting bagi kampanye dengan tujuan memberikan literasi agar masyarakat dapat merubah perilaku agar semakin banyak Masyarakat yang *aware* terhadap lingkungan. Kampanye ini menekankan pendekatan kepada masyarakat urban yang menjadi hulu dari hilirnya fokus isu besar yaitu sampah plastik sekali pakai.¹⁷

Menurut Iman Abdurrasyid Husain, Diana Hertati (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik”, menyatakan bahwa limbah plastik menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, maka pemerintah

¹⁶ Faisal Reza, Hendra Setiawan, Uah Maspuroh. *Framing Berita Pengelolaan Sampah di Indonesia pada Media Daring Detik.com dan Antaranews.com*. Vol. 12, No.2,2022

¹⁷ Keisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini. *Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID)*, Jakarta:2020 Vol.09 No.01

memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan implementasi dari hierarki pengelolaan sampah di beberapa daerah. Kemampuan sumberdaya yang rendah dan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yang masih tinggi tidak menunjukkan proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan antara pengurangan dan penanganan sampah plastik. Ada empat faktor yang menunjukkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum terimplementasi dengan optimal, yaitu: faktor komunikasi menunjukkan adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi karena sosialisasi kebijakan belum massif, faktor sumber daya memperlihatkan kemampuan fasilitas yang dimiliki belum memadai, faktor disposisi menunjukkan komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas yang kurang baik terhadap kebijakan, faktor struktur birokrasi juga masih ditemukan kekurangan dan hambatan terkait fragmentasi dan standar operasional prosedur. Maka dari itu, diperlukan peningkatan sumber daya yang memadai dan inovasi kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif dalam mengurangi sampah plastik.¹⁸

Menurut Hartuti Purnaweni (2004) dalam jurnalnya yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Hambatan dan Tuntutan”, menyatakan bahwa banyak kebijakan di negara-negara berkembang biasanya merupakan *soft countries*, negara yang lunak dalam penegakan hukum (law enforcement) nya. Kebijakan kadang

¹⁸ Iman Abdurrasyid Husain, Diana Hertati. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik*, Surabaya:2023 Vol 13 No.02

kurang sempurna dalam formulasinya. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan tergantung dari banyak unsur, mulai dari sisi formulasi kebijakan, yaitu unsur perwakilan rakyat dan pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum sebagai pelaksana di lapangan. *Pressure* atau tekanan terhadap penegakan hukum harus datang dari Masyarakat. Harus ada mass media dan publik yang peduli terhadap lingkungan. Kini tuntutan terhadap kebijakan – kebijakan yang berorientasi pada lingkungan semakin bertambah, terutama di negara maju. Misalnya dengan kebijakan standar ISO, *eco labelling* untuk berbagai produk.¹⁹

Menurut Shariah Asmuni, Nur Bashirah Hussin, Jamaliah Mhd. Khalili, Zahariah Mohd Zain (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “*Public Participation and Effectiveness of the No Plastic Bag Day Program in Malaysia*” untuk memungkinkan pengembangan perilaku pro-lingkungan, perubahan kebiasaan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dapat diajarkan melalui insentif atau disinsentif melalui mekanisme seperti pungutan atas produk yang berpotensi menimbulkan polusi seperti pungutan atas penggunaan kantong plastik. Dengan adanya paparan yang tepat bagi konsumen terhadap praktik-praktik ini, mereka dapat negatifnya terhadap lingkungan. Inisiatif lingkungan oleh pemerintah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan partisipasi Masyarakat. Untuk meningkatkan Tingkat efektivitas dan partisipasi Masyarakat dalam program maka kesadaran akan program ini dapat ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan budaya membawa tas sendiri saat

¹⁹ Hartuti Purnaweni. Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia, September:2004, Vol 1 No.03

berbelanja dan membuat praktik ini lebih nyaman, terutama bagi laki-laki karena mereka cenderung tidak membawa tas saat berbelanja. Karena perilaku membawa tas sendiri tidak mungkin bergantung pada informasi program yang dibawa oleh poster dan selebaran di dalam toko, media sosial dapat digunakan untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perubahan kebiasaan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.²⁰

Menurut Muhammad Qadri (2020) dalam juarnalnya yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik” Pengaruh media sosial dalam membangun opini publik terletak pada peranannya sebagai alat komunikasi yang menghubungkan komunikator publik atau politik dengan masyarakat. Sebagai saluran komunikasi, media sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan membentuk perilaku politik, karena dapat berperan dalam membentuk opini publik. Pengelolaan opini publik yang baik akan memberikan keuntungan dalam meraih pengaruh di kalangan masyarakat. Media sosial juga terbukti efektif sebagai sarana komunikasi, terutama dalam menyampaikan informasi dan menerima umpan balik dari audiens. Umpan balik tersebut dapat mempererat hubungan antara komunikator publik atau politik dengan masyarakat. Saat ini, penggunaan media sosial semakin meluas, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil. Dengan penyajian informasi yang tepat, audiens akan lebih mudah memahami pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator

²⁰ Shahariah Asmuni, Nur Bashirah Hussin, Jamaliah Mhd. Khalili, Zahariah Mogd Zain. *Public Participation and Effectiveness of the No Plastic Bag Day Program in Malaysia*, Malaysia:2015 328 - 340

publik. Pada akhirnya, melalui penyampaian pesan politik yang jelas dan efektif, dapat menarik simpati masyarakat sehingga tujuan komunikator publik dapat tercapai.²¹

Beberapa literatur penelitian terdahulu tadi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan, kebijakan berbasis pengurangan penggunaan kantong plastik. Lebih lanjut dapat dilihat pada table ini.

Tabel 1.3 Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka

No	Kategori Pengelompokan	Hasil/Temuan
1.	Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik	Hartuti Purnaweni (2004), Iman Abdurrasyid Husain, Diana Hertati (2023), Menurut Harfin Nurulhaq, Kismaartini, Amirudin (2020) Mengungkapkan bahwa banyak kebijakan di negara berkembang masih kurang sempurna dalam formulasinya. Kemampuan sumberdaya yang rendah dan penggunaan kantong plastik yang masih tinggi tidak menunjukkan proses yang sistematis. Ada empat factor yang menunjukkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum terimplementasi dengan optimal, yaitu :Faktor komunikasi, Faktor sumberdaya, Faktor Disposisi, dan Faktor struktur birokrasi.
2	Strategi Komunikasi Publik	Kurnia, Yenni, Oji (2022). Faisal, Hendra, Uah (2022). Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini (2020).Muhaimin, Noor Khalida (2021). Upaya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi Bersama <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam sikap dan perilaku peduli lingkungan. Dengan Upaya melakukan kampanye pada media online, serta membangkitkan kesadaran dan memberikan literasi agar Masyarakat lebih <i>aware</i> terhadap isu lingkungan

²¹ Muhammad Qadri. *Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik*. Sulawesi Tengah, 2020. Vol.1 No.1

3	Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik	Marsatana dan Aminah (2020). Ghifary Prinardi, Dian Purwanti, Yana Fajar FY Basori (2023). Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi diperlukannya kebijakan yang tepat dan komprehensif. Dan cara penanganan sampah yaitu menggunakan metode 5R yaitu, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot
4	Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik	Menurut Muhammad Qadri (2020). Media sosial berperan penting dalam membangun opini publik dengan menghubungkan komunikator publik atau politik dengan masyarakat. Sebagai saluran komunikasi, media sosial efektif menyampaikan informasi, menerima umpan balik, dan mempererat hubungan. Dengan penyajian informasi yang jelas dan tepat, media sosial dapat memengaruhi perilaku politik, membentuk opini publik, serta membantu komunikator meraih simpati dan dukungan, bahkan di wilayah terpencil.

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.3 menampilkan pengelompokan dari penelitian terdahulu yang fokus pada Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik, Strategi Komunikasi Publik, Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik. Namun ternyata belum ada penelitian yang komprehensif yang menjelaskan Kebijakan Publik dalam konteks Peran Media Online dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah maka kebaruan itu lah yang akan saya tawarkan. Oleh karena itu judul yang akan saya teliti adalah “ **Analisis Peran Media Online Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik** “

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti menemukan dan merumuskan masalah bahwa jumlah timbunan sampah per hari di Kota Jambi sebesar 423,45 ton dan hanya 78% (330,58 ton). Pemerintah Kota Jambi telah berupaya mengatasi sejumlah permasalahan tersebut dengan menerbitkan regulasi lokal, yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 yang mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik. Namun, hingga saat ini, pembatasan penggunaan kantong plastik masih meluas di pasar tradisional, rumah makan, pedagang plastik, warung, dan penjual di pinggir jalan (pedagang kaki lima). Sampah rumah tangga juga masih banyak menggunakan kemasan plastik daripada kardus.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dari pemerintah terkait pembatasan pengurangan penggunaan plastik belum mencapai tingkat optimal. Framing sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh media untuk membahas suatu kasus. Media kemudian benar-benar mengukur bagian apa saja yang harus mereka masukkan ke dalam berita mereka. Menonjolkan segi kasus yang mana, mengukur sampai mana bahasannya, dan juga memanipulasi sudut mana yang harus mereka bahas sehingga hal tersebut dapat membentuk opini Masyarakat. Maka peneliti ini mengajukan pertanyaan **“Bagaimana Peran Media Online Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik”**

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah menjelaskan peran media online dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah Kota Jambi tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran penting media online dalam lingkungan sekitar, serta menambah khasanah keilmuan bagi Fakultas Hukum, dan program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengembangkan peranan media massa dalam membentuk opini publik.

Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara memperluas cakrawala pengetahuan dalam memahami media online dalam membentuk opini publik dan menjadi salah satu rujukan mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pemberitaan dan mengkoreksi media dalam penyampaian berita kepada khalayak Masyarakat terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, agar lebih baik lagi.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Definisi Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan,

sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas²². MacIver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintah, fungsi – fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu *focus of interest*.²³

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan dengan menjelaskan bagaimana media online itu dapat memengaruhi proses tata kelola, komunikasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Melalui analisis peran media, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya media dalam membangun legitimasi kebijakan, khususnya dalam isu – isu lingkungan, seperti pengelolaan sampah plastik. Hal ini dapat memperkuat kajian terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Definisi Kebijakan Publik

Carl J. Federick, sebagaimana yang dikutip oleh Leo Agustino, mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu di mana terdapat tantangan dan peluang terhadap implementasi proposal kebijakan tersebut dengan

²² Lihat Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.

²³ Dalam Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal. 6

tujuan mencapai suatu tujuan tertentu.²⁴ Pendapat ini menekankan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki tujuan yang jelas, yang merupakan aspek penting dari definisi kebijakan, karena penting untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan dalam kebijakan daripada sekadar apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan terkait dengan suatu masalah.

Menurut Thomas R. Dye seperti yang dikutip oleh Kamal Alamsyah, *Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and materials services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. This public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive –or all these things at once.* Pemerintah melakukan banyak hal; mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mereka mengorganisir masyarakat untuk menghadapi konflik dengan masyarakat lain, mereka mendistribusikan berbagai jenis penghargaan simbolik dan layanan materi kepada anggota masyarakat, dan mereka mengambil uang dari masyarakat, umumnya dalam bentuk pajak. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat bersifat regulatif, organisasional, distributif, atau ekstraktif – atau bahkan semua hal tersebut sekaligus.²⁵

²⁴ Leo Agustino. 2008, Dasar – Dasar Kebijakan Publik

²⁵ Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press

Tahap – Tahap Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak tahap dan faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa ahli politik membagi tahapan ini menjadi beberapa langkah untuk memudahkan analisis kebijakan publik, meskipun urutannya mungkin berbeda-beda. Menurut William Dunn, seperti yang disitir oleh Budi Winarno, tahapan kebijakan publik mencakup beberapa langkah sebagai berikut:²⁶

1. Tahap penyusunan agenda: Para pejabat yang bertanggung jawab menempatkan masalah tertentu pada agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah tersebut bersaing untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah dipilih untuk menjadi fokus pembahasan, sementara yang lain mungkin tidak disentuh sama sekali atau ditunda untuk waktu yang lama karena alasan tertentu.

Tahap formulasi kebijakan: Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan dan dicari solusi terbaik. Solusi tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Dalam tahap ini, setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Tahap adopsi kebijakan: Dari berbagai alternatif kebijakan yang

²⁶ Budi Winarno. *Jurnal Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2007. Halaman 30-31

diajukan, satu di antaranya akhirnya diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, atau putusan pengadilan.

Tahap implementasi kebijakan: Kebijakan yang telah diadopsi harus diimplementasikan oleh badan administrasi dan agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi ini melibatkan mobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Dalam tahap ini, berbagai kepentingan bersaing, di mana beberapa mendukung implementasi kebijakan, sementara yang lain mungkin menentangnya. Menurut Edward III dalam karya Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama:

Komunikasi, yang membutuhkan transmisi yang jelas dan konsisten mengenai tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (target group) agar mengurangi distorsi dalam implementasi.

Sumberdaya, di mana kekurangan sumber daya seperti sumber daya manusia dan finansial bagi pelaksana kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten.

Disposisi, mencakup watak dan karakteristik implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor yang memiliki disposisi yang baik dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, namun jika terdapat perbedaan sikap atau perspektif antara

implementor dan pembuat kebijakan, implementasi kebijakan bisa menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, yang meliputi struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Aspek-aspek struktur organisasi seperti Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menyebabkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang membuat aktivitas organisasi menjadi kurang fleksibel.²⁷

Tahap evaluasi kebijakan: Kebijakan yang telah diimplementasikan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Evaluasi ini menggunakan ukuran atau kriteria yang ditetapkan untuk menilai apakah kebijakan publik telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

²⁷ Agustinus, Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi). Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2011. Halaman. 90-92

Media Berita

Berita merupakan hasil dari proses kompleks pengkategorian dan pemilihan peristiwa dan topik tertentu ke dalam satu kategori.²⁸ Schudson menegaskan bahwa berita adalah hasil dari penciptaan nilai – nilai sosial, yang selalu melibatkan perspektif dan elemen – elemen tertentu, sehingga pemahaman atas realitas yang ada tergantung pada bagaimana fakta-fakta tersebut dilihat dan diinterpretasikan. Akibatnya, berita dapat dipahami sebagai hasil dari pemrosesan informasi ketika perspektif – perspektif tertentu diperhitungkan.²⁹

Media juga berkontribusi terhadap pembentukan realitas yang digambarkan dalam berita.³⁰ Komunikator menggunakan media untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Dalam konteks ini, media massa mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, film, dan televisi untuk menyampaikan pesan – pesan tersebut kepada audiens.³¹

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi kepada masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada surat kabar, radio, atau televisi, tetapi juga pada teknologi online atau berbasis internet. Media online didefinisikan sebagai media yang diakses secara online melalui sebuah website maupun aplikasi

²⁸ Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS

²⁹ Schudson, M. (2002). Media Berita Sebagai Institusi Politik. *Annu. Rev. polit. Sci*

³⁰ Muslim. (2013). Konstruksi Media tentang Serangan Israel terhadap Libanon. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.

³¹ Cangara, H. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Raja Grafindo Persada

pemberitaan lainnya. Media online juga merupakan produk jurnalistik berbasis internet yang diproduksi dan disebarakan secara online.³²

Media online, yang juga sering disebut sebagai New Media, merujuk pada bentuk-bentuk media dan konten media yang dibentuk oleh perkembangan teknologi. Internet merupakan salah satu bentuk New Media yang paling dominan pada abad ke-21. Sebagai teknologi baru, media dan teknologi berkembang bersamaan, fenomena ini dikenal sebagai konvergensi media. Konvergensi media mengacu pada gabungan dua atau lebih media tradisional menjadi satu proses, yang memiliki dampak besar bagi media lainnya dan pengguna media tersebut.³³

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi kepada masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada surat kabar, radio, atau televisi, tetapi juga pada teknologi online atau berbasis internet. Media online didefinisikan sebagai media yang diakses secara online melalui sebuah situs web. Media online juga merupakan produk jurnalistik berbasis internet yang diproduksi dan disebarakan secara online.³⁴

³² Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

³³ Sumadiria, A.S.H. (2005) *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Professional*. Simbiosis Rekatama Media.

³⁴ Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Framing Media

Media sering dikaitkan dengan konsep framing. Framing, yang dijelaskan oleh Eriyanto merujuk pada metode yang digunakan oleh media untuk membentuk presentasi sebuah peristiwa.³⁵

Robert N. Entman merupakan salah satu individu yang menggunakan rincian dalam analisis framing sebagai metode untuk menguji konten media. Robert N. Entman mendefinisikan framing sebagai proses pemelihan dan penekanan aspek – aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing menempatkan pesan – pesan dalam konteks sehingga beberapa isu mendapat lebih banyak perhatian daripada yang lain. Menurutnya, pemberian sorotan adalah teknik yang membuat peristiwa terlihat lebih menarik, signifikan, dan mudah diingat bagi audiens. Secara teknis, framing media mengorganisir informasi dengan mengecualikan isu – isu lain dan menekankan beberapa aspek melalui penggunaan gambar, penempatan wacana yang menonjol, pengulangan, dan penggunaan bahasa kiasan saat menggambarkan individu tau peristiwa yang dilaporkan.³⁶

Entman berpendapat bahwa ada dua tingkatan konteks berita. Pertama, konsepsi pemahaman yang digunakan dalam pemrosesan informasi sebagai ciri khas dari suatu teks berita, seperti perspektif anti militer yang digunakan untuk menganalisis informasi tentang demonstrasi dan kerusuhan. Kedua, elemen – elemen teks berita yang digunakan untuk memaknai suatu peristiwa, seperti penggunaan metafora, kata kunci, dan penekanan pada gambar dan foto dalam teks berita. Menurutnya, ada empat elemen

³⁵ Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS

³⁶ Entman, R. (1993). Pembingkai: Menuju Klarifikasi Paradigma yang Retak. *Jurnal Komunikasi*.

yang digunakan untuk mengetahui framing yang digunakan oleh media, yaitu *define problems* (mengidentifikasi masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *provide treatment recommendation* (memberikan rekomendasi perawatan). Berikut ini adalah komponen spesifik dari analisis *framing* Robert N. Entman.

Tabel 1.4 Komponen Framing oleh Robert N. Entman

Mendefinisikan Masalah	Peristiwa apa yang menjadi pokok bahasannya? Atau isu apa yang sedang dibicarakan?
Mendiagnosis Penyebab	Mengapa peristiwa atau masalah tersebut terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebabnya dari masalah tersebut?
Membuat penilaian moral	Mengapa peristiwa atau masalah tersebut terjadi? Siapa yang dianggap sebagai penyebabnya dari masalah tersebut?
Rekomendasi pengobatan	Bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan? Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah?

Sumber: diolah oleh penulis dari Entman (1993)

Oleh karena itu, analisis *framing* melibatkan pengamatan terhadap cara media mengkonstruksi realitas, baik itu peristiwa, individu, kelompok, dan sebagainya. Dalam proses pembingkaihan ini, realitas diinterpretasikan kembali dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan kepentingan mereka, media menggunakan framing untuk menyoroti aspek-aspek tertentu atau menghadirkan mereka dengan penekanan khusus.

Dampaknya, audiens cenderung mengasosiasikan bagian-bagian tertentu dengan tingkat makna, perhatian, signifikansi, dan pemahaman yang lebih besar.³⁷

Ada dua Tingkat konteks berita: tingkat pemahaman yang digunakan dalam pemrosesan informasi dan sebagai fitur yang membedakan dari teks berita, seperti perspektif anti – militer yang digunakan untuk menganalisis informasi tentang demonstrasi dan kerusuhan, dan elemen – elemen teks berita yang digunakan untuk menginterpretasi sebuah peristiwa, seperti metafora, kata kunci, dan penekanan pada gambar. Ada empat elemen yang digunakan untuk menentukan framing media: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan memberikan rekomendasi penanganan.³⁸

Teori yang digunakan oleh media untuk membentuk opini publik melalui proses pembingkaihan. Pembingkaihan ini mencakup bagaimana media menggambarkan sebuah isu dengan mencari konteks yang sering terkait dengan isu tersebut. Penggambaran ini, baik melalui nama, kata, atau sebutan lainnya, menjadi variabel dalam menciptakan citra suatu isu dalam berita. Framing juga dapat dianggap sebagai proses penekanan atau konstruksi penafsiran untuk memengaruhi penerima pesan, yang diyakini dapat memberikan makna terhadap fenomena tertentu yang mempengaruhi pemahaman publik. Namun, pengaruh *framing* ini bergantung pada individu itu sendiri.

³⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 256.

³⁸ Entman, R. . (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*.

Dalam *framing*, terdapat dua perspektif, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Dalam perspektif makroskopis, media membentuk opini publik dengan membingkai sebuah isu sesuai dengan norma jurnalistik yang berlaku dan menggunakan kerangka kerja yang diterapkan oleh jurnalis. Perspektif ini juga dikenal sebagai *central organizing media*, yang memberikan konteks yang luas kepada audiens. Di sisi lain, perspektif mikroskopis memfokuskan pada pemrosesan individu dan penataan informasi dalam pembentukan opini publik terhadap berita nasional maupun internasional.

Teori pembingkai dalam media dibagi menjadi tiga bidang: *frame building*, *frame setting*, dan efek *framing* individu dalam masyarakat. *Frame building*, atau pembentukan bingkai, mengacu pada proses terbentuknya *framing* dalam media berdasarkan faktor internal dan eksternal. Proses ini mencari bagaimana suatu isu dapat muncul dalam media dan faktor-faktor apa yang menyebabkan media memiliki sudut pandang tertentu terhadap isu tersebut.

Selanjutnya, *frame setting* adalah tahap yang mempelajari dampak dari pembingkai yang dilakukan oleh media terhadap sikap, perilaku, dan cara berpikir individu terhadap isu tertentu. Tahap ini kemudian diikuti oleh tahap efek *framing* individu dalam masyarakat, di mana dampak dari pembingkai tersebut mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan kolektif atau gerakan sosial di masyarakat. Bidang ketiga ini menekankan bahwa individu yang dipengaruhi oleh *framing* yang disajikan

oleh media akhirnya merasa perlu mengekspresikan pandangannya secara publik, mungkin dalam bentuk aksi protes.³⁹

Dalam membentuk opini publik, sistem kerja *framing* dilakukan melalui media dengan proses yang disebut aplikabilitas. Aplikabilitas ini bekerja dengan cara menerapkan bingkai yang telah tersimpan di dalam memori seseorang, yang kemudian dievaluasi berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh individu tersebut. Proses aplikabilitas ini melibatkan negosiasi.⁴⁰ Dengan kata lain, pengaruh frame media terhadap audiens tidak langsung terjadi, tetapi tergantung pada bingkai pribadi yang dimiliki individu, yang kemudian dievaluasi dengan bingkai yang diberikan oleh media.

Teori *framing* bertujuan untuk mengubah skema individu melalui bingkai yang disajikan oleh media, baik dengan membuat hal atau atribut isu yang awalnya tidak berkaitan menjadi berkaitan, atau memperkuat skema yang telah dimiliki individu sebelumnya. Framing digunakan oleh media untuk mengemas berita agar mudah diingat oleh publik. Ketika bingkai yang disajikan oleh media menarik perhatian publik, hasilnya adalah pemahaman publik terhadap poin penting atau pesan yang ingin disampaikan oleh media.

³⁹ Eriyanto. 2018. Media dan Opini Publik. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

⁴⁰ Scheufele, B. & Scheufele, D. A. 2013. Framing and Priming Effects: Exploring Challenges Connected to Cross-Level Approaches in Media Effects Research. Dalam Erica Scharrer (ed), *The International Encyclopedia of Media Studies Vol. V (Media Effects/Media Psychology)*. Oxford:Blackwell

Proses Framing

Menemukan perspektif atau sudut pandang yang diadopsi oleh jurnalis saat memilih dan menyajikan berita merupakan tujuan lain dari analisis *framing*. Berita yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh proses editorial di perusahaan media. Bingkai yang disusun dalam organisasi media tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikan jurnalis dan filosofi organisasi media. Terdapat tiga prosedur framing yang umum digunakan oleh organisasi media:

- a. Teknik *framing* digunakan untuk menampilkan realitas dengan mengubah kebenaran tentang suatu insiden secara halus daripada menolaknya secara langsung. Ini dilakukan dengan menekankan ciri-ciri tertentu, menggunakan kata-kata dengan implikasi khusus, serta menggunakan gambar, karikatur, dan teknik ilustrasi lainnya.
- b. Prosedur pembingkai merupakan bagian penting saat memutuskan apakah laporan seorang reporter akan diterbitkan dan memilih judul berita. Proses penyuntingan melibatkan seluruh anggota staf di departemen redaksi media cetak atau redaktur pelaksana, dengan atau tanpa konsultasi.
- c. Pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda juga dapat terlibat dalam proses pembingkai. Dalam situasi ini, setiap pihak berusaha untuk menonjolkan informasi yang ingin mereka sampaikan sambil meredam sudut pandang lawan.

Langkah pertama dalam analisis *framing* adalah memahami bagaimana media menciptakan realitas. Peristiwa tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang terjadi;

sebaliknya, realitas secara aktif dibentuk oleh jurnalis dan media. Ide tentang realitas diproduksi oleh jurnalis, yang kemudian dipresentasikan kepada penonton melalui berbagai acara yang tercipta dari peristiwa aktual, fakta, dan individu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana media membangun peristiwa tersebut sehingga fokusnya adalah pada bagaimana bingkai itu dibuat oleh media daripada sekadar menyajikan informasi sebagai negatif atau positif.⁴¹

Efek Framing

Realitas dipahami dan disajikan kepada audiens dalam konteks *framing*. Media memiliki kemampuan untuk membingkai dan menginterpretasikan realitas dengan cara yang berbeda, yang sering kali menghasilkan makna yang sangat beragam. Dalam kekompleksan dan multidimensi realitas, saat disajikan dalam berita, mungkin menjadi sangat disederhanakan. Proses framing dan definisi realitas sering berjalan seiring. Bagaimana suatu peristiwa dipahami sering tergantung pada cara bagaimana peristiwa tersebut dibingkai. Saat peristiwa yang sama diinterpretasikan secara berbeda, dapat menghasilkan cerita-cerita yang beragam dan, pada akhirnya, realitas yang berbeda pula.⁴²

Salah satu efek paling mendasar dari framing adalah bagaimana realitas sosial yang kompleks dan bervariasi digambarkan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, teratur, dan konsisten dengan logika tertentu. Teori framing menjelaskan

⁴¹ Muhammad, Qadari, Ibnu Ahmad, Agus Sudibyo, *Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), 19.

⁴² Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. (Yogyakarta: LKiS, 2002), 140.

bagaimana jurnalis memberikan kerangka, prioritas, dan penyederhanaan pada peristiwa tertentu. Dengan demikian, framing mengungkapkan bagaimana media mempersepsikan peristiwa dan menganggapnya sebagai berita, sesuai dengan sudut pandang khusus media terhadap peristiwa tersebut. Realitas yang dibentuk oleh *framing* media adalah apa yang kemudian dilihat oleh audiens sebagai realitas setelah disajikan kepada mereka.

Framing biasanya melibatkan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari realitas. Dalam konteks penulisan berita, ini sering dianggap sebagai konsentrasi berita yang sengaja atau tidak sengaja pada fitur-fitur tertentu, yang berakibat pada pengabaian terhadap aspek-aspek lain yang juga penting untuk memahami realitas tersebut. Selain itu, berita sering kali berfokus pada aktor-aktor tertentu, sehingga beberapa aspek lain dari realitas tidak mendapatkan perhatian yang memadai.⁴³

Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Publik adalah serangkaian konsep, kerangka kerja, dan pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan di tingkat pemerintahan.

Tujuan dari teori kebijakan publik adalah untuk memberikan pemahaman yang

⁴³ *Ibid.*, 140

lebih baik tentang bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, dan dievaluasi, sehingga dapat membantu para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

2. Media Berita adalah media bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap realitas politik dan sosial. Peran media berita sebagai penjaga peristiwa, pembuat agenda, mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta penjaga kekuasaan politik dan institusi sosial juga merupakan bagian dari inti pemahaman tentang media berita
3. Teori Framing Media adalah proses di mana media memilih, menekankan, dan mengaitkan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipercayai untuk membentuk persepsi dan interpretasi audiens terhadap suatu peristiwa atau isu. Ini melibatkan pemilihan kata, gambar, narasi, dan fokus pemberitaan yang mengarahkan perhatian publik ke arah tertentu, seringkali sesuai dengan sudut pandang atau agenda tertentu. Framing media memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini dan sikap publik terhadap isu-isu yang dipresentasikan oleh media.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran konkret dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut. Definisi ini menggambarkan cara peneliti mengukur atau mengoperasionalisasikan variabel-variabel yang relevan dalam konteks

penelitian. Karena penelitian ini ingin menganalisis bagaimana *framing* media online maka peneliti menggunakan teori framing oleh Robert N. Entman (1993).

Berikut adalah indikator pengukur tercapainya tujuan framing media yaitu:

Menentukan masalah : Identifikasi isu utama yang ditekankan oleh media. Dengan mengukur bagaimana media menggambarkan masalah atau isu apakah penggunaan kantong plastik digambarkan sebagai masalah lingkungan atau sosial.

Pendefinisian Masalah : Peristiwa apakah yang menjadi pokok pembahasan? Atau isu yang menjadi pokok bahasan?

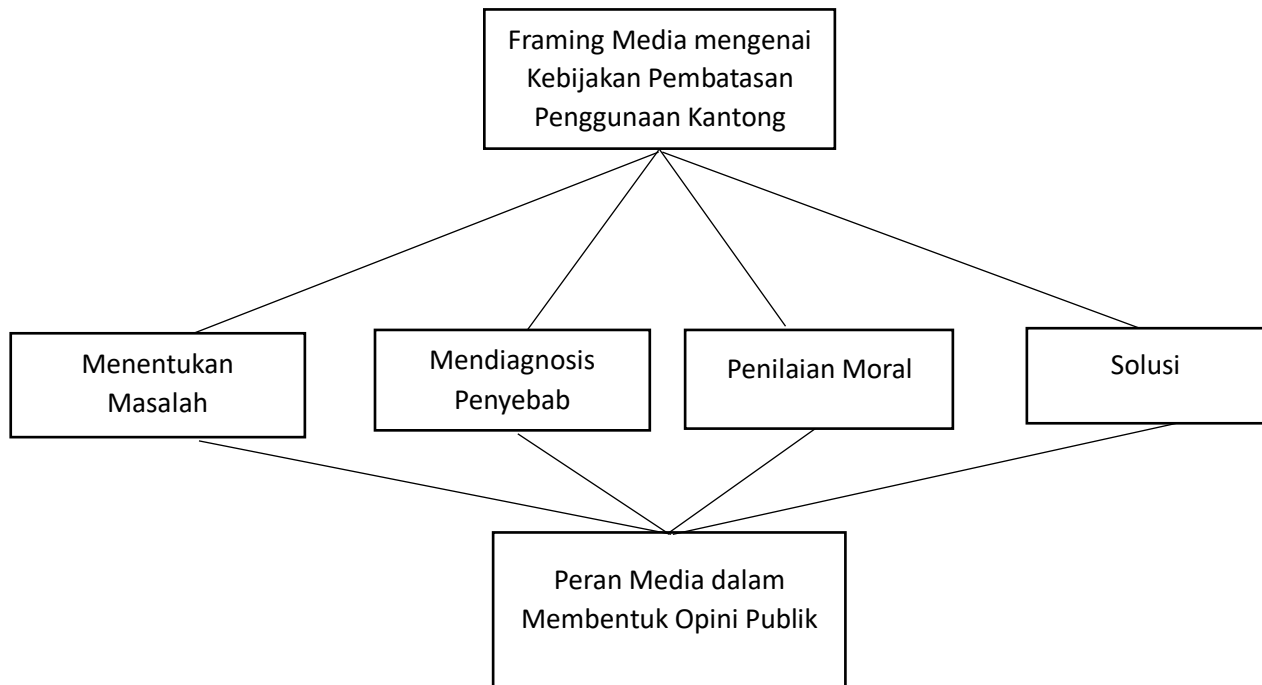
Mendiagnosis Penyebab Masalah : Penentuan penyebab yang disorot oleh media terkait masalah yang diidentifikasi. Dengan mengukur bagaimana media mengaitkan penyebab tertentu dengan masalah yang dibahas, seperti apakah media menyalahkan konsumen, produsen, atau kebijakan pemerintah sebagai penyebab utama masalah penggunaan kantong plastik.

Penilaian Moral : Evaluasi moral atau penilaian yang diberikan oleh media terhadap masalah dan penyebabnya. Dapat diukur dengan bagaimana media memberikan penilaian moral terkait penggunaan kantong plastik, seperti apakah media menilai tindakan tertentu sebagai benar atau salah, baik atau buruk.

Solusi : Rekomendasi atau Solusi yang disarankan oleh media untuk mengatasi masalah. Dengan mengukur bagaimana media menyarankan

Solusi untuk masalah yang diidentifikasi, seperti apakah media mendukung kebijakan tersebut, atau kampanye kesadaran Masyarakat.

Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman makna daripada generalisasi.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *"Memahami Penelitian"*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h.2.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung dengan individu – individu yang terlibat dalam situasi atau fenomena tersebut.⁴⁵ Secara khusus, pendekatan penelitian yang dipilih adalah Studi Kasus, karena peneliti rasa paling tepat menggunakan metode ini untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan penggunaan kantong plastik di Kota Jambi.

Studi kasus adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara mendalam, rinci, intensif, holistik, dan sistematis tentang seseorang.⁴⁶ Dalam pendekatan ini, peneliti biasanya meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Peneliti berusaha menemukan semua variabel penting yang terkait dengan subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga mempelajari perkembangan subjek, penyebab terjadinya hal tersebut, perilaku sehari – hari subjek, alasan perilaku tersebut dilakukan, serta bagaimana perilaku berubah dan factor penyebab perubahan tersebut.⁴⁷

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah dan memberikan informasi yang relevan untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan secara luas pada berbagai konteks. Dalam analisis data, penelitian ini akan

⁴⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 328.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 339.

⁴⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 57

menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan dari hasil analisis yang diteliti.⁴⁸ Dengan Demikian, peneliti ingin mendalami tentang bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan penggunaan kantong plastik di Kota Jambi.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui analisis media online. Media online yang dianalisis meliputi portal berita, blog, website, dan publikasi lain yang membahas kebijakan pemerintah Kota Jambi tentang penggunaan kantong plastik. Penelitian juga memanfaatkan berbagai sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap peran media dalam membentuk opini publik.

c. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ditujukan kepada aspek – aspek yang terkait dengan pemahaman mendalam terhadap peran media online dalam membentuk dan memengaruhi opini publik terkait kebijakan pemerintah di Kota Jambi. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana media massa memainkan peran kunci dalam membentuk opini public terkait kebijakan pemerintah Kota Jambi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek komunikasi dan dinamika informasi yang ada dalam masyarakat.

⁴⁸ David Marsh dan Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusamedia, 2002), hlm.242.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu melalui perantara media berita. Data sekunder biasanya berupa bukti catatan, laporan, peraturan, kebijakan atau laporan historis yang tersusun dalam sebuah arsip atau berbentuk dokumenter, file baik sudah terpublikasikan atau tidak terpublikasi.⁴⁹ Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian, berbentuk table sebagai berikut:

Tabel 1.5 Sumber Data

No.	Media	Jumlah
1	TribunJambi.com	8
2	Jambione.com	5
3	MetroJambi.com	4
4	CNNIndonesia.com	5

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan periode 2021 – Sekarang

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari media online yang membahas kebijakan pemerintah Jambi tentang penggunaan kantong plastik. Penyajian table tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi terhadap sumber data yang digunakan. Dengan menunjukkan jumlah dan distribusi data secara terbuka, peneliti meningkatkan kredibilitas penelitian, karena data yang digunakan dapat diakses dan diperiksa keabsahannya.

e. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁹ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 112

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik studi pustaka. Teknik ini memiliki empat karakteristik utama. Pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan teks, bukan data lapangan. Kedua, data yang digunakan sudah tersedia. Ketiga, data yang dikumpulkan adalah sumber sekunder, bukan hasil observasi langsung di lapangan. Keempat, data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena sudah merupakan data tetap yang tidak mengalami perubahan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah teks berita. Teks berita diambil dari beberapa media daring. Pengumpulan data dilakukan dengan mengetikkan kata kunci pada fitur pencarian masing-masing platform berita daring dan ketiga media. Artikel dan komentar yang mengandung kata kunci secara otomatis terfilter dan muncul. Semua artikel dan komentar yang muncul kemudian dikumpulkan dalam satu folder berdasarkan filenya.⁵⁰

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan mengalami proses tahap demi tahap sebelum dioperasikan. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, dan Effendi (2020)⁵¹, terdapat empat langkah dalam analisis data, yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan.

⁵⁰ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (2008), h. 4-5

⁵¹ Al-Hamdi, DKK, *Penelitian Kualitatif Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2020)

1. Pengumpulan dan pengolahan data, Informasi yang terkumpul dari sumber data yang disusun, dikelompokkan secara intensif dengan kebutuhan peneliti. Data yang relevan dengan indikator yang telah ditetapkan akan dipilih untuk diolah lebih lanjut.
2. Seleksi data, Data yang telah terkumpul akan disusun sesuai dengan kategorinya, dan hanya data yang memiliki nilai tambah dalam analisis akan dipertahankan.
3. Analisis antar-variabel dan verifikasi data, Langkah selanjutnya adalah menghubungkan berbagai variabel atau indikator dalam data. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antar variabel dan memastikan keakuratan data yang digunakan.
4. Penafsiran dan penarikan Kesimpulan, Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk menyimpulkan rangkaian penelitian secara keseluruhan.

g. Teknik Keabsahan data

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu.⁵² Menurut Sugiyono triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.
3. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu peneliti akan menganalisis berita, artikel, atau publikasi lainnya yang diterbitkan pada berbagai waktu.⁵³

2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi adalah peneliti mengumpulkan bahan referensi yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data – data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto – foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, h.74

⁵³ Sugiyono, *op. cit.*, h.127.

⁵⁴ Sugiyono, *op. cit.*, h. 129.